



DAFTAR PUSTAKA

- Anti Korupsi. (2017). Cegah Korupsi Dana Desa. Diakses pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 00.20. <https://antikorupsi.org/id/article/cegah-korupsi-dana-desa>
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arimanondang, P. D., Kesuma, A. I., & Kurniawan, I. S. (2022). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, Vol 7, No 3.
- Atmaja, L. S. (2013). *Teori dan Praktek Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.
- Bawias, R., Pangkey, M. S., & Rorong, A. J. (2015). Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 32.
- Bintarto. (2009). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Caro, C. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. *Governance e-Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan* 4(3), 55-69.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Donaldson, L., & Davis, J. (1991). Teori Stewardship or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16.
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Faridah, & Suryono, B. (2015). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 4 No.5.
- Hadi, B. (2020). *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa*. Jakarta: KOMPAK.
- Hanifah, S. I., & Sugeng, P. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4.8, 1-15.



- Hoesada, J. (2016). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hutapea, H. D. (2017). “*Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi: Desa Di Kecamatan Sunggul Kabupaten Delidrdang)*.”.
- Iqsan. (2016). Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1*.
- Iznillah, Luthfi, M., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis.
- Klaten. (2023). Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Desa Melalui Pemasangan Papan Informasi APBDes. Diakses pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 23.40. <https://joho.prambanan.klatenkab.go.id/berita>
- Krina, L. L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabiitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Laksmi, Gani, F., & Budiantoro. (2015). *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mason, J. (2002). *Qualitative Researching*. London: SAGE Publication.
- McCracken, G. (1988). *The Long Interview*. Newbury Park: Sage Publications Inc.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Musikal, Siregar, & Usulan. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Mustopadidjaja. (2000). *Perkembangan Penerapan Studi Kebijakan*. Jakarta: LAN.
- Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2022*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*



- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*
- Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.*
- Ramadanis, & Ahyarudin, M. (2019). Akuntansi dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Universitas Muhammadiyah Riau 9, No.1.*
- Renyowijoyo, M. (2010). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua.* Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rizal, Fitri, S. A., & Rantika, D. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. *Jurnal Al-Iqtishad, Vol 14, No 1 (2018).*
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif, 1(1).*
- Satori, D., & Komariah, A. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif.* Bandung: Alfabeta.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual).* UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.



- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulumini, H. H. (2015). Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Donggala . *katalogis. Volume 3. Nomor 1*, 43-53.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Wahida. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. *Universitas Hasanudin Makasar*.
- Wandari, I. D., Sujana, E., & Adiputra, I. M. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah Di Kabupaten Buleleng. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*.
- Widjaja. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.